

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya. Menurut Jokowi, BMKG punya peran sangat strategis untuk penanganan perubahan iklim, antara lain terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrem.

"Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan, karena itu saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh," kata Jokowi dalam acara Rakornas BMKG secara virtual, Senin (8/8).

Dia menambahkan, BMKG harus mengidentifikasi dan melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peralatan untuk pemodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit.

"Memperkuat layanan informasi BMKG dan literasi di terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem," ujar mantan wali kota Solo itu.

Ia mengingatkan, perubahan iklim yang berada dalam kondisi kritis merupakan

tantangan nyata bagi semua pihak setelah meredanya pandemi Covid-19. Jokowi menambahkan, berdasarkan data World Meteorological Organization, perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk. Bahkan, 2021 menjadi tahun dengan suhu terpanas selama 7 tahun terakhir.

"Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujarnya.

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dampak perubahan iklim sangat luas dan multisektoral, salah satunya berefek pada bencana alam dan ketahanan pangan.

Mengutip data Badan Pangan Dunia, Jokowi menyebut lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia adalah kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim.

Jokowi menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkeadilan, serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," katanya. ● han

2 Polhukam

FOTO:ANT



GERINDRA DAN PKB MENDAFTAR BERSAMA KE KPU

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersalam komando dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) usai mendaftarkan partainya masing-masing sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/8). Gerindra menjadi partai ke-17 dan PKB menjadi partai ke-18 yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU.

Komnas HAM Prioritaskan Uji Balistik untuk Ungkap Kasus Kematian Brigadir J

Komnas HAM melakukan pemeriksaan terkait bekas luka sayatan di tubuh Brigadir J. Pemeriksaan dilakukan di tempat lain.

oleh pak Beka, memang ada perkembangan yang menurut mereka penting, sehingga kepingin menyampaikan, memberi keterangan kepada Komnas HAM secara lebih lengkap," tuturnya.

mendapatkan konfirmasi yang detail terkait tiga minggu yang lalu yang sudah kami dapatkan,

ini masih terkait soal luka, kami kepingin satu proses yang lebih dalam lagi," ujarnya. ● lus

KPU Imbau 98 Anggota KPUD yang Namanya Dicatut Klarifikasi

JAKARTA (IM) - Ketua Divisi Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, meminta 98 anggota KPUD yang namanya dicatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) karena didaftarkan partai politik (parpol) untuk memberikan surat klarifikasi.

"Sejak 1 Agustus 2022 kami membuka partisipasi masyarakat untuk mengecek NIK mereka dalam aplikasi Sipol, apakah mereka terdaftar dalam satu keanggotaan partai politik," ujar Idham Holik, kepada awak media di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8).

Ia meminta seluruh jajaran KPU RI dari tingkat pusat hingga daerah agar mengecek namanya masing-masing apakah tercatat dalam Sipol.

"Kami tekankan kepada penyelenggara kami se-Indonesia untuk melakukan pengecekan secara mandiri. Informasi soal 98 nama yang kami sampaikan ke media beberapa hari lalu itu merupakan informasi yang disampaikan

KPU provinsi oleh individu masing-masing," kata Idham.

KPU RI, ia melanjutkan, telah berupaya melakukan klarifikasi dan mereka tidak tahu awalnya namanya dicatut.

"Itu merupakan hasil pengecekan mandiri. Setelah kami tanyakan ke KPU Provinsi mereka seluruhnya menyatakan tidak tahu-menahu. Mereka tidak pernah melakukan permohonan penerbitan KTA parpol. Karena syarat menjadi penyelenggara Pemilu di daerah tidak boleh berpindah politik lima tahun terakhir," ujarnya.

Idham mengingatkan, sesuai dalam ketentuan KPU RI di Pasal 32 Ayat 1 huruf A apabila ada penyelenggara pemilu yang menjadi anggota parpol, potensinya keanggotaan parpolnya tidak memenuhi syarat.

"Oleh karena itu, kami akan menerbitkan surat memerintahkan kepada KPU se-Indonesia agar melakukan pendataan secara resmi dan mereka juga menyampaikan surat klarifikasi kepada kami," tuturnya. ● han

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) kini memprioritaskan pemeriksaan Uji balistik Polri yang sempat tertunda beberapa kali.

Uji balistik dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti pendukung baru dalam mengungkap kasus kematian Brigadir J yang terjadi di Rumah Dinas mantan Kadiv Propam Polri Iriyan Ferdy Sambo, Duran Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7).

"Yang kita agendakan Minggu ini dan kami membutuhkan yang sangat strategis itu adalah balistik yang sudah tertunda beberapa waktu. Jadi, itu yang kami prioritaskan. Semoga soal balistik ini Minggu ini bisa segera bertemu antara tim balistik dengan Komnas HAM," kata Komisisioner Komnas HAM, Chairul Anam kepada wartawan di

Kantor Komnas HAM, Senin (8/8).

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan permintaan keterangan uji balistik terhadap pihak kepolisian atas kasus penembakan Brigadir J harus kembali ditunda. Rencananya, permintaan keterangan uji balistik akan dilakukan pada Rabu (10/8).

"Proses balistik hari ini tidak bisa diselenggarakan. Kami sepakat waktu itu tadi Rabu minggu depan (10/8/2022)," ucap Komisisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers, Jumat (5/8).

Anam mengatakan, penundaan uji balistik lantaran pihak Polri menyampaikan adanya perkembangan yang cukup penting. Sehingga, pihak Polri akan memberikan keterangan pada agenda selanjutnya.

"Seperti yang disampaikan

KPU: Baru 14 Parpol Mendaftar Jadi Peserta Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Divisi Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyebutkan, hingga Senin (8/8) pagi, baru ada 14 dari 41 partai politik (parpol) yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2024 ke kantor KPU RI.

Idham menyebutkan, banyak parpol yang belum mendaftar dan belum menyampaikan kapan akan melakukan pendaftaran hingga batas akhir pada 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

"Ya mereka belum menyampaikan alasannya kepada kami. Kami juga tidak pernah menyampaikan itu. Cuma kami menyampaikan kepada mereka agar melakukan pendaftaran sebelum tanggal akhir pendaftaran," ujar Idham Holik, Senin (8/8).

Ia menjelaskan, sebelum 14 Agustus 2022 pihaknya menyarankan parpol yang sudah memegang akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk mendaftar lebih awal.

"Ini untuk memastikan apabila terdapat ketidaklengkapan untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau draf akhir dan itu tidak lengkap maka selesai. Kami akan tolak dan syarat parpol itu diterima apabila dokumennya lengkap," tutur Idham.

Dari 14 parpol yang mendaftar 1-7 Agustus 2022, tapi yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap berkasnya hanya 10 parpol.

"Hari ini ada 4 partai politik yang akan mendaftar, jadi totalnya nanti akan ada 18 partai politik yang mendaftar. Setelah partai politik dinyatakan lengkap dokumen pendaftarannya, maka di hari kemudian kami akan lakukan verifikasi administrasi sampai dengan 11 september 2022," tutur Idham.

Kemudian pada 14 September 2022 KPU RI akan menyampaikan hasil kepada parpol yang bersangkutan apabila terdapat kekurangan maka sesuai dengan

persyaratan peraturan perundang-undangan parpol tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang harus diperbaiki berdasarkan verifikasi administrasi.

"Partai politik yang belum lengkap karena mereka belum mengisi persyaratan yang dibutuhkan ke dalam Sipol. Namun, kami terus memantau lewat Sipol dan data mereka rata-rata sudah di atas 50 persen," tuturnya.

Di sisa enam hari batas pendaftaran hingga 14 Agustus 2022 malam, Idham sudah mengingatkan kepada parpol yang belum mendaftar ke KPU RI agar segera mendaftar dengan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

"Potensi itu ada tapi kami terus berkomunikasi kepada partai politik agar mendaftar jangan sampai di hari akhir, walaupun kami tetap layani sampai hari akhir," ucapnya. ● mei



FOTO:ANT

PEMERINTAH IZINKAN MASKAPAI NAIKKAN HARGA TIKET

Calon penumpang melihat jadwal penerbangan lewat layar elektronik di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (8/8). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat yang berkisar 15 persen hingga 25 persen tergantung jenis pesawat karena adanya fluktuasi harga bahan bakar pesawat (Avtur).

Hakim Tolak Eksepsi Mas Bechi Terdakwa Pencabulan Santriwati

SURABAYA (IM) - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sutrisno, menolak eksepsi terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42).

Pusan sela itu dibacakan pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (8/8) pagi.

Sidang kali ini mengagendakan putusan sela yang dihadiri oleh 10 tim kuasa hukum terdakwa dan 9 kuasa hukum penuntut umum. Sidang putusan sela kali ini digelar terbuka untuk umum.

Dalam putusan sela, majelis hakim mengatakan, menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan pihak kuasa hukum MSAT atas dakwaan yang tidak cermat bisa dibuktikan dalam sidang pembuktian nantinya.

Sementara itu, atas putusan sela ini pihak kuasa hukum berdalil bahwa eksepsi tersebut dilakukan kuasa hukum, karena kuasa hukum belum pernah menerima BAP.

Kuasa Hukum MSAT Gede Pasek Suardika menegaskan, bahwa pihaknya telah siap dengan bukti dan saksi dalam sidang pembuktian nantinya.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tirta pada sidang agenda putusan sela dari majelis hakim mengatakan, bahwa eksepsi permintaan dari kuasa hukum terdakwa tidak diterima oleh hakim.

Namun, majelis hakim mengabulkan terkait soal kehadiran terdakwa msat di ruang sidang, tetapi tetap dengan syarat, di antaranya tertib dan mematuhi protokol kesehatan.

Meski demikian, atas permohonan pihak kuasa hukum yang meminta sidang digelar secara offline dengan menghadirkan MSAT dalam persidangan dikabulkan oleh majelis hakim, dengan syarat mematuhi protokol kesehatan, serta tetap menjaga ketertiban umum. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda kesaksian terdakwa. ● mei

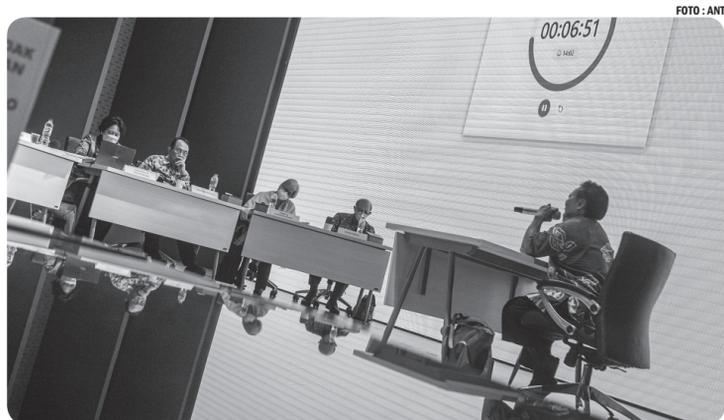


FOTO:ANT

SELEKSI CALON ANGGOTA KOMNAS HAM 2022-2027

Ketua Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Makarim Wibisono (kedua kiri) bersama anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo (kiri), Kamala Chandrakirana (ketiga kiri), dan Ichsan Malik (keempat kiri) mengajukan pertanyaan kepada calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027 Hari Kurniawan (kanan) dalam sesi tes wawancara di Jakarta, Senin (8/8). Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 menggelar sesi Wawancara terhadap 27 calon anggota Komnas HAM.

PT SURYA DHARMAGATI, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan")

PANGGLAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("Rapat"), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/31 Agustus 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Perseroan, yang beralamat di J.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu 1 & 11 Pantai Indah Kapuk Blok C No.01 s/d 05, Perumahan - Kencana Masra, Jakarta Utara

Dengan acara sebagai berikut:

- **Memberhentikan** dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan, pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (actual et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka, sekaligus mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 31-8-2022 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh dua) sampai dengan tanggal 31-8-2027 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tujuh) menjadi sebagai berikut: ---
- Direktur Utama : Tuan WIRYANTO, KHONG;
- Direktur : Tuan DARWIN KONG;
- Direktur : Tuan KONG, ANDREW;
- Komisaris : Tuan BUDIARTO KONG;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

CATATAN:

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah ditandatangani kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kuasanya, apabila Pemegang Saham berhalangan hadir.

Bahwa mengingat mekanisme terlaksananya RUPS Perseroan yang akan diadakan ini telah sesuai dengan aturan yang tercantum baik dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa undangan dan RUPS Perseroan ini tidak dapat dibatalkan/diisnggah.

Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.

Jakarta, 9 Agustus 2022
PT SURYA DHARMAGATI
Direksi

PENGUMUMAN

Saya, INGRID JONATHAN, dengan ini mengumumkan bahwa saya bermaksud untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham PT CAPITAL RESOURCES INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") secara langsung dari pemegang saham Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengambilalihan saham tersebut dapat menyampaikannya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Gedung Equity Tower, Lt. 8 Suite BA, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (2) dan (8) dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 9 Agustus 2022
INGRID JONATHAN

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Cikal Klinik tertanggal 8 Agustus 2022, para pemegang saham PT Cikal Klinik berkedudukan di Jakarta ("Perseroan") telah memutuskan dan menyetujui untuk membubarkan Perseroan terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan selanjutnya Perseroan berada dalam likuidasi, dan menunjuk Nyonya LUDMILLA ARIF sebagai likuidator. Sehubungan dengan hal tersebut, kami Likuidator Perseroan, memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan, hutang-hutang dan hubungan hukum lainnya serta menyampaikan secara tertulis kepada Likuidator pada alamat di bawah ini paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ludmilla Arif, Likuidator
PT Cikal Klinik
Jl. Lebak Bulus II No. 16A
Cilandak Barat, Cilandak
Jakarta Selatan